

ANALISIS ICOR

MENURUT WILAYAH PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 - 2022



ANALISIS ICOR

MENURUT WILAYAH PEMBANGUNAN

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2018 - 2022

<https://jateng.bps.go.id>



ANALISIS ICOR

MENURUT WILAYAH PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH 2018-2022

Nomor Publikasi : 33000.2349

Katalog : 9201025.33

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 57 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

ANGGOTA TIM PENYUSUN

Pengarah : Dr Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab : Didik Nursetyohadi, M.Agb.

Penyunting : Dra Eny Pramudyastuti

Penulis : Hayu Wuranti, S.Si

Retabulasi : Joko Mulyono

Penyusun : Hayu Wuranti, S.Si

Salah satu faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah tingkat investasi. Investasi merupakan bagian penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan suatu wilayah. Besar kecilnya investasi akan berpengaruh pada perekonomian wilayah tersebut. Perkembangan suatu sektor ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan nilai investasi yang ditanamkan pada sektor tersebut. Investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

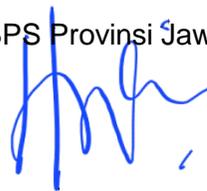
Penyusunan publikasi Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menurut Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan barang modal dalam proses produksi pada masing-masing wilayah pembangunan.

Publikasi ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan dan memberikan informasi berharga bagi para pengguna data BPS, baik dari kalangan pemerintah maupun publik.

Saran dan kritik perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Semarang, September 2023

Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah



Dadang Hardiwan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	6
1.3. Ruang Lingkup.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN.....	9
2.1. Pengertian Investasi.....	9
2.2. Pengertian Output.....	14
2.3. Pengertian Nilai Tambah.....	15
2.4. Pengertian ICOR.....	15
2.5. Metode Penghitungan ICOR.....	21
BAB III. PERKEMBANGAN EKONOMI JAWA TENGAH.....	27
3.1. Arah Pengembangan Perwilayahan.....	27
3.2. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut WP	31
3.3. Potensi Perekonomian Wilayah Pembangunan	34
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Perkembangan Nilai PMTB.....	37
4.2. Analisis ICOR Wilayah Pembangunan	39
BAB V. KESIMPULAN	55

	Halaman
Tabel 3.1. Lapangan Usaha dengan Kontribusi Terbesar menurut Wilayah Pembangunan, 2022.....	27
Tabel 3.2. Peranan PDRB Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Persen).....	28
Tabel 4.1. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Barlingmascakeb, 2018-2022	41
Tabel 4.2. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Purwomanggung, 2018-2022	44
Tabel 4.3. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Subosukawonosraten, 2018-2022	45
Tabel 4.4. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Banglor, 2018-2022	47
Tabel 4.5. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Wanarakuti, 2018-2022.....	48
Tabel 4.6. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Kedungsepur, 2018-2022.....	50
Tabel 4.7. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Petanglong, 2018-2022.....	51
Tabel 4.8. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Bregasmalang, 2018-2022.....	53

	Halaman
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pembangunan Tahun 2018-2022 (Persen).....	32
Gambar 3.2. Peranan PDRB Wilayah Pembangunan 2022...	33
Gambar 3.3. Peranan PDRB Wilayah Pembangunan 2018...	33
Gambar 4.1. Perkembangan Nilai PMTB ADHK Wilayah Pembangunan, Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)...	38
Gambar 4.2. Pertumbuhan PMTB Wlayah Pembangunan , 2018-2022 (Persen).....	39
Gambar 4.3. Perkembangan ICOR menurut Wilayah Pembangunan, Tahun 2018-2022.....	40
Gambar 4.4. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Barlingmascakeb, 2018-2022.....	41
Gambar 4.5. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Purwomanggung, 2018-2022.....	43
Gambar 4.6. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Subosukawonosraten, 2018-2022.....	45
Gambar 4.7. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Banglor, 2018-2022.....	46
Gambar 4.8. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Wanarakuti, 2018-2022.....	48
Gambar 4.9. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kedungsepur, 2018-2022.....	49
Gambar 4.10. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Petanglong, 2018-2022.....	51

Gambar 4.11. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Wilayah Bregasmalang, 2018-2022..... 52

<https://jateng.bps.go.id>

Investasi merupakan salah satu sumber pertumbuhan, karena peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kemampuannya untuk menyediakan lebih banyak input yang diperlukan dalam proses produksi. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Semakin besar investasi yang ditanamkan untuk menunjang kegiatan ekonomi, semakin besar pula tingkat pertumbuhan yang akan dicapai.

Lebih dari seperempat pembentukan PDRB Jawa Tengah pada tahun 2022 disumbang oleh Wilayah Pembangunan Kedungsepur sebesar 26,69 persen disusul Subosukawonosraten yang menyumbang 19,81 persen, Barlingmascakeb sebesar 17,53 persen dan Wanarakuti sebesar 12,96 persen. Kontribusi wilayah pembangunan lainnya masih di bawah 10 persen.

Perkembangan nilai investasi di seluruh wilayah pembangunan selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2022, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan. Wilayah pembangunan yang memiliki nilai investasi tertinggi selama lima tahun terakhir dimiliki oleh Kedungsepur. Sementara itu share terendah dari nilai investasi berada di wilayah Banglor yang nilainya masih di bawah 2 persen.

Wilayah pembangunan yang memiliki nilai koefisien ICOR paling tinggi selama periode 2018-2022 adalah wilayah Kedungsepur dengan nilai koefisien ICOR di atas 8. Hal ini memberikan gambaran bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Kedungsepur relatif paling tidak efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di Kedungsepur cenderung bersifat capital intensive. Wilayah yang memiliki nilai koefisien ICOR ideal (efisien) yaitu berada pada kisaran 3-4 pada periode 2018-2022 adalah Wilayah Banglor dan Bregasmalang. Wilayah pembangunan lainnya pada periode tersebut memiliki nilai koefisien ICOR di atas 4, sehingga bisa dikatakan kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Pembangunan lainnya relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut cenderung bersifat capital intensive.

1.1. Latar Belakang

Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto untuk skala negara atau peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Regional Bruto untuk skala provinsi, kabupaten, atau kota. Dalam konteks daerah, pembangunan suatu daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999; Blakely, 1989). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antar daerah dan antarsektor.

Meskipun pada akhir dasawarsa 1960-an banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi, dan berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986: 12; Meier, 1989: 7), namun pada praktiknya di banyak negara setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal dari luar dan melakukan industrialisasi..

Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill) maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985). Artinya, tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Semakin besar investasi maka semakin besar tingkat pertumbuhan yang dicapai. Sebaliknya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin besar pendapatan yang dapat ditabung dan investasi akan meningkat (Todaro, 2003).

Determinan penting yang berpengaruh terhadap pembentukan output perekonomian di suatu wilayah adalah stok kapital. Dalam model pertumbuhan Harrod Domar dinyatakan bahwa output merupakan fungsi dari stok capital dan tenaga kerja pada tingkat teknologi tertentu (Hess and Ross, 1997). Investasi akan meningkatkan stok kapital, sedangkan depresiasi/penyusutan akan mengurangi stok kapital (Mankiw, 2007). Kenaikan stok kapital akan meningkatkan kapasitas suatu wilayah dalam proses penciptaan output perekonomian. Dengan demikian, investasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal ini menyebabkan persediaan modal bertambah (Mankiw, 2007:186). Pertambahan investasi kemudian akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan adanya pertambahan faktor-faktor produksi, terutama penambahan peralatan produksi dan perbaikan faktor-faktor produksi tersebut. Pengerahan atau mobilisasi dana tabungan guna menciptakan bekal investasi dalam jumlah yang memadai dibutuhkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003:113).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sumber-sumber pembiayaan bisa berasal dari ekspor, bantuan luar negeri, investasi asing dan

tabungan domestik (Kuncoro, 1997:215). Adapun alokasi modal yang kita kenal sebagai investasi, utamanya berasal dari dua sumber yakni baik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing). Investasi yang berasal dari dalam negeri/domestik maupun luar negeri/nondomestik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi tidak hanya menaikkan permintaan agregat, tetapi juga menaikkan penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi meningkatkan stok capital dan setiap penambahan stok kapital akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang terkait dengan investasi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jika koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar dapat menunjukkan bahwa terjadi inefficiency dalam investasi. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Namun demikian, untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah apakah bersifat capital intensive atau labor intensive.

Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1988). Widodo (1990) menyatakan bahwa, produktivitas investasi dapat dikatakan baik apabila nilai ICOR berada pada kisaran 3 - 4.

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Untuk melihat keterkaitan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan indikator ICOR. Nilai ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Kajian mengenai ICOR menjadi sangat penting dan menarik untuk mendorong peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kajian tersebut diharapkan dapat mengetahui penyebab tingginya angka ICOR, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi bahan kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong investasi yang akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

1.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Maksud

Penyusunan publikasi Incremental Capital Output Ratio Menurut Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ini, dimaksudkan untuk mendapatkan rasio penghitungan yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi tentang seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan di masing-masing wilayah pembangunan dan melihat keterbandingan iCOR antar wilayah pembangunan.

1.2.2 Tujuan

Secara umum publikasi ini disusun untuk mendapatkan sebuah ukuran kuantitatif sebagai bahan kajian investasi ekonomi makro menurut wilayah pembangunan di Jawa Tengah. Secara khusus adalah untuk:

1. Menghitung besarnya ICOR seluruh sektor ekonomi (lapangan usaha) menurut pengelompokan 1 (satu) digit berdasarkan *International Standard*

Industrial Classification (ISIC) menurut wilayah pembangunan di Jawa Tengah.

2. Menganalisis nilai ICOR menurut wilayah pembangunan di Jawa Tengah.

1.2.3 Manfaat

Hasil penyusunan Incremental Capital Output Ratio menurut Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perencanaan dari program pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya kebijakan dalam program-program pembangunan di bidang ekonomi yang terkait dengan investasi pada masing-masing wilayah pembangunan.

1.3 Ruang Lingkup

Wilayah cakupan dalam penyusunan ICOR ini adalah Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. ICOR yang akan disusun meliputi 8 wilayah pembangunan pada periode tahun 2018-2022. Analisis terhadap ICOR 2020 tidak dilakukan karena merupakan kondisi khusus, dimana perekonomian seluruh dunia mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19. Guncangan ini sudah tentu akan berdampak pada nilai ICOR, yang nilainya sangat anomali (aneh).

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam publikasi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab 1 berisi Pendahuluan. Bab ini memberikan pengantar berupa latar belakang penulisan, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi Konsep dan Metode Penghitungan. Pada bab ini membahas mengenai konsep investasi, output, nilai tambah, ICOR serta metode penghitungan ICOR.

Bab 3 berisi Perkembangan Perekonomian menurut Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah. Pada bab ini membahas arah perkembangan perwilayahan, perekonomian pada 8 wilayah pembangunan di Jawa Tengah dilihat dari kontribusi, pertumbuhan dan potensi ekonomi.

Bab 4 berisi Pembahasan. Bab ini membahas tentang perkembangan nilai investasi, angka ICOR serta kebutuhan dan pilihan Investasi menurut Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah.

Bab 5 berupa Kesimpulan. Bab ini memberikan kesimpulan dari apa yang diperoleh dalam penghitungan ICOR.

<https://jateng.bps.go.id>

BAB. II

KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN

2.1. Pengertian Investasi

Investasi sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Untuk menghasilkan output, selain membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja juga diperlukan barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Dengan investasi diharapkan dapat menambah stok kapital dan pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan demikian, output dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara.

Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian pentingnya informasi investasi. Berdasarkan *System of National Accounts* (SNA), besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah perubahan inventori/stok. SNA adalah buku panduan yang diterbitkan oleh United Nations (PBB) mengenai penyusunan neraca nasional. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal, seperti: bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. Sedangkan investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. Dalam kajian ini, lebih ditekankan pada investasi fisik. Konsep investasi yang digunakan dalam penghitungan ICOR mengacu pada konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi adalah pembentukan barang modal tetap (*fixed capital formation*) yang terdiri atas: tanah, gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan barang modal lainnya. Sementara itu, nilai pembentukan modal mencakup:

1. Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,
2. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,
3. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,
4. Penjualan barang modal bekas.

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri **dikurangi** penjualan barang modal bekas.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Secara lebih rinci PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

PMTB dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. PMTB menurut jenis barang modal,
2. PMTB menurut lapangan usaha/sector,
3. PMTB menurut institusi.

PMTB menurut jenis barang modal

PMTB menurut jenis barang modal dapat dibedakan atas:

1. Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrikjaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya.
2. Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan restoran.
3. Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan sebagainya.
4. Barang modal lainnya seperti: perluasan hutan; pengembangan/ perluasan lahan; penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; dan sebagainya.

PMTB menurut Lapangan Usaha

Klasifikasi PMTB menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan Listrik & Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor
8. Transportasi & Pergudangan

9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
10. Informasi & Komunikasi
11. Jasa Keuangan & Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya

PMTB menurut Institusi

PMTB menurut institusi dibedakan atas tiga kelompok berikut:

1. Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah yang menyelenggarakan general administration, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk membangun gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah sebagai administration, termasuk juga bila pemerintah mengeluarkan biaya untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan irigasi, dan sebagainya.
2. Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk pengeluaran biaya oleh pemerintah pada butir a. di atas. Kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial dan nonfinansial.

3. Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik sendiri secara besar-besaran dianggap sebagai bagian dari pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan keharusan meng-imputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik milik sendiri maupun rumah dinas.

2.2. Pengertian Output

Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata lain, output merupakan “keluaran” atau hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik dalam suatu periode tertentu.

Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam proses. Output yang dimaksud adalah:

1. Barang-barang yang dihasilkan.
2. Tenaga listrik yang dijual.
3. Selisih nilai stok setengah jadi.

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.

Dalam pengertian ICOR, output adalah tambahan produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan

faktor-faktor produksi. Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya factor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan.

2.3. Pengertian Nilai Tambah

Konsep Nilai Tambah berkaitan erat dengan konsep penghitungan output. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara (bukan barang modal).

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan data penyusutan barang modal dan pajak tak langsung, maka pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk penghitungan ICOR ini.

2.4. Pengertian ICOR

Dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tertentu, sangat diperlukan adanya perkiraan kebutuhan investasi dengan benar. Model Harold Domar mengaitkan adanya pengaruh tambahan stok kapital terhadap output yang dikenal dengan ICOR. Perhitungan ICOR sangat dibutuhkan dalam menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tumbuh dan dengan ICOR dapat dilihat seberapa efisien investasi yang ditanamkan pada periode tertentu.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) memiliki peranan yang penting dalam teori ekonomi. ICOR atau rasio kenaikan output akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan.

ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan capital yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Nilai ICOR diperoleh dari perbandingan antara besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Tambahan kapital diperoleh dari investasi.

Hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dikembangkan pertama kali oleh R.F. Harrod dan Evsey Domar. Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Domar mengemukakan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam *American Economic Review*, sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri – sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang dikenal sebagai teori Harrod – Domar (Arsyad, 1988). Koefisien itu mengaitkan pertambahan kapasitas terpasang (capital) dengan pertumbuhan ekonomi (output).

Teori Harrod – Domar mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.

2. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ini berarti dalam analisis dianggap tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor luar negeri.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan masyarakat untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya tetap. Demikian juga rasio antara modal – output (capital output ratio = COR) dan rasio pertambahan modal-output (incremental capital output ratio = ICOR) adalah tetap (Arsyad, 1988).

Dalam model pertumbuhan Harrod – Domar mencakup persamaan sebagai berikut (Hess and Ross, 1997):

$$H1) K = vY \quad (2.1)$$

$$H2) L = uY \quad (2.2)$$

$$H3) I = S \quad (2.3)$$

$$H4) S = sY \quad (2.4)$$

$$H5) \Delta L/L = n \quad (2.5)$$

Berdasarkan persamaan (2.1) dan (2.2) dapat dirumuskan persamaan fungsi produksi sebagai berikut:

$$Y = A \min (K/v, L/u) \quad (2.6)$$

Keterangan :

Y = Output

A = Teknologi

K = Stok Kapital

- L = Jumlah tenaga kerja
- I = Investasi
- S = Jumlah Tabungan
- v = Rasio Kapital-Output
- u = Rasio Tenaga Kerja-Output
- s = Tingkat Tabungan
- n = Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja Alami

Dengan asumsi $A = 1$, maka untuk memperoleh perubahan output sebesar ΔY diperlukan perubahan input sebagai berikut:

$$H1') \Delta K = v \Delta Y \quad (2.7)$$

$$H2') \Delta L = u \Delta Y \quad (2.8)$$

Dengan membagi persamaan (2.7) dengan (2.1) dan persamaan (2.8) dengan (2.2) akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K/K = v \Delta Y/vY = \Delta Y/Y \quad (2.9)$$

$$\Delta L/L = u \Delta Y/uY = \Delta Y/Y \quad (2.10)$$

keterangan:

$\Delta Y/Y$ = Laju Pertumbuhan Output

$\Delta K/K$ = Laju Pertumbuhan Kapital

$\Delta L/L$ = Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja

Dalam perekonomian sederhana tanpa campur tangan pemerintah dan perdagangan luar negeri, pada kondisi keseimbangan pasar barang maka $I = S$. Tabungan diperoleh dari output yang tidak dikonsumsi. Dengan demikian, Investasi adalah bagian output yang tidak dikonsumsi.

Dari persamaan (2.3), (2.4), dan (2.7) dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K = I = S = s Y \quad (2.11)$$

$$v \Delta Y = \Delta K = I = S = s Y \quad (2.12)$$

$$v \Delta Y = s Y \quad (2.13)$$

$$v \Delta Y/vY = s Y/v Y \quad (2.14)$$

$$\Delta Y/Y = s/v \quad (2.15)$$

Beberapa kelemahan dari Teori Harrod – Domar adalah sebagai berikut:

1. Anggapan bahwa MPS (*Marginal Propensity to Save*) dan ICOR konstan adalah anggapan yang terlalu kaku mengingat dalam jangka panjang mungkin sekali kedua variabel tersebut berubah.
2. Teori Harrod – Domar beranggapan proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal bernilai tetap. Anggapan ini tidak dapat dipertahankan mengingat pada kenyataannya hubungan antara tenaga kerja dan modal tidak selalu dalam proporsi yang tetap.
3. Model Harrod – Domar mengabaikan perubahan-perubahan harga pada umumnya. Padahal perubahan harga selalu terjadi di setiap waktu dan sebaliknya dapat mengendalikan situasi ekonomi yang tidak stabil.
4. Asumsi bahwa suku bunga tidak berubah adalah tidak relevan dengan analisis yang bersangkutan. Suku bunga dapat berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi investasi.

Pada dasarnya teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep yaitu:

1. Rasio Modal – Output atau Capital Output Ratio (COR) atau sering disebut sebagai *Average Capital Output Ratio* (ACOR), yaitu

perbandingan antara modal yang digunakan dengan output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. COR atau ACOR ini bersifat statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan perbandingan modal dan output.

2. Rasio Modal – Output Marginal atau *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan modal (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Konsep ICOR ini lebih bersifat dinamis karena menunjukkan perubahan/penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan modal.

Dari pengertian pada butir (2) di atas, maka ICOR bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \quad (2.16)$$

Keterangan :

ΔK = investasi, atau penambahan barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = pertambahan output

Sebagai ilustrasi, jika diketahui bahwa koefisien ICOR di suatu daerah sebesar 4. Artinya untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 4 unit. Jika output di daerah itu pada tahun sebelumnya sebesar 4 triliun rupiah, maka agar output pada tahun yang akan datang tumbuh 10 persen, atau bertambah sebesar 0,4 triliun rupiah, dibutuhkan investasi sebesar $4 \times \text{Rp. } 0,4 \text{ triliun} = 1,6 \text{ triliun}$ rupiah.

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok modal,

melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \quad (2.17)$$

Keterangan :

I = Investasi

ΔY = perubahan output

Peningkatan output tidak hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

2.5. Metode Penghitungan ICOR

Ada dua metode penghitungan ICOR yang digunakan, yaitu metode standar dan metode akumulasi investasi. Penghitungan ICOR dibatasi hanya dengan menggunakan metode standar lag 0, lag 1, dan lag 2.

2.5.1. Metode Standar

Secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung ICOR adalah:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \quad (2.18)$$

Keterangan :

ΔK = penambahan capital/ barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = penambahan output

Dalam praktek, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya realisasi nilai investasi

yang ditanam baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan $\Delta K = I$ (investasi), maka rumus (2.18) dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \quad (2.19)$$

Rumus (2.19) ini disebut dengan Gross ICOR, yaitu suatu rasio yang menunjukkan besarnya tambahan unit kapital yang diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output pada suatu periode tertentu. Dalam penerapannya rumus Gross ICOR ini lebih sering dipakai karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap.

Dalam beberapa hal untuk kasus-kasus tertentu, investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga, sehingga rumus (2.19) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \quad (2.20)$$

Keterangan :

I_t = investasi pada tahun ke t

Y_t = output pada tahun ke t

Y_{t-1} = output pada tahun ke t-1

Rumus (2.20) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke-t akan menimbulkan output pada tahun t itu juga. Pada metode standar, langkah penghitungan dilakukan terlebih dahulu dengan mencari ICOR pada masing-masing tahun untuk periode waktu t_1 s.d t_n , sehingga akan didapatkan nilai ICOR sebanyak n buah. ICOR yang dianggap dapat mewakili untuk periode waktu tersebut (t_1 s.d t_n) diperoleh dengan jalan membagi antara jumlah nilai ICOR selama periode waktu t_1 s.d t_n dengan jumlah tahun (n), atau dengan mencari rata-rata nilai ICOR selama periode t_1 sampai dengan t_n .

Prinsip dari penghitungan ICOR metode standar ini adalah rata-rata sederhana dan penulisannya secara matematis sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \quad (2.21)$$

Kelemahan dari penggunaan rata-rata sederhana ini adalah jika terjadi suatu koefisien ICOR yang ekstrim pada tahun-tahun tertentu, maka koefisien ini berpengaruh pada nilai rata-rata koefisien ICOR dalam periode waktu penghitungan. Namun demikian, penggunaan metode standar ini mempunyai daya tarik lain yaitu mampu mencerminkan *inefficiency* yang sering terjadi dalam praktek.

2.5.2. Metode Akumulasi Investasi

Pendekatan penghitungan ICOR dengan metode akumulasi berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan output selama periode waktu t disebabkan karena adanya akumulasi investasi selama periode waktu t.

Perumusan ICOR dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan output selama periode waktu t1 sampai tn yang secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \quad (2.22)$$

Kelebihan dari metode akumulasi adalah, dalam penerapannya metode ini terkandung prinsip rata-rata tertimbang. Dengan digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien ICOR ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari.

Tetapi, metode akumulasi ini tidak memperhitungkan kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi relatif kurang mampu mencerminkan *inefficiency*, yang memang terjadi dalam praktek.

2.5.3. Time Lag Investasi

Biasanya investasi yang ditanam pada tahun tertentu tidak secara langsung memberikan hasil tambahan output pada tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi dapat menghasilkan tambahan output disebut time lag (lag).

Jika investasi yang ditanam pada tahun ke-t baru menimbulkan kenaikan output setelah s tahun, maka rumus (4) di atas (ICOR metode standar) dengan adanya faktor time lag dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{\sum It}{\sum (Y_{t+s} - Y_{t+s-1})} \quad (2.22)$$

Keterangan :

Time Lag = 0,1,2,3,4 dst.

S = lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil/output terhitung sejak penanaman investasi

2.5.4. Koefisien ICOR Negatif

Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi barang modal baru tersebut sementara belum memproduksi atau telah memproduksi tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR-pun menjadi negatif. Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi jika ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi *inefficiency*. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi.

2.5.5. Koefisien ICOR yang Besar dan Positif

Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Koefisien ICOR yang besar juga bisa terjadi pada lapangan usaha yang bersifat *capital intensive*.

2.5.6. Asumsi Dasar

Walaupun pertambahan output sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi. Dalam penghitungan ICOR ini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi. Dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan (*ceteris paribus*). Jadi perubahan/kenaikan output hanya disebabkan oleh adanya perubahan kapital/investasi.

Output dari suatu kegiatan ekonomi merupakan input antara untuk kegiatan ekonomi lainnya, sehingga jika digunakan konsep output dalam penghitungan ICOR dirasakan kurang tepat karena akan terjadi penghitungan ganda (*double counting*), yaitu output dari suatu perusahaan akan dihitung kembali sebagai input perusahaan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam penghitungan ICOR digunakan konsep Nilai Tambah.

Konsep Nilai Tambah (*Value Added*) yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini selanjutnya dinamakan dengan istilah ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*). Meskipun demikian, ukuran ICVAR ini juga digunakan untuk memprediksi suatu rasio investasi terhadap output menurut lapangan usaha, dan bukannya terhadap nilai tambah semata.

ICOR yang disajikan telah memperhitungkan perubahan inventori (selisih stok) baik bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Dalam pendekatan

mikro, umumnya perusahaan diasumsikan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok barang untuk kelancaran produksi. Dalam pendekatan makro, perusahaan dianggap telah membuat keputusan akumulasi stok dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan datang. Misalnya, dalam hal ada kecenderungan bahan baku akan melonjak, perusahaan dapat mengambil keputusan melakukan akumulasi stok bahan baku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mendatang. Penghitungan ICOR di sini, menggunakan pendekatan makro, dengan menganggap perubahan inventori/stok sebagai bagian dari pembentukan modal (investasi).

Beberapa asumsi lainnya yang dipakai dalam penyusunan ICOR ini adalah:

1. Perubahan output semata-mata hanya disebabkan oleh perubahan kapital/adanya investasi.
2. Faktor-faktor lain di luar investasi, seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan wiraswasta diasumsikan konstan.

Dengan asumsi di atas angka ICOR mempunyai keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi, apakah dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor produksi atau tingkat produktivitasnya.
2. Tidak mampu menjelaskan besaran peranan faktor di luar perubahan kapital dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi.
3. Proses penghitungan ICOR yang optimal sebaiknya menggunakan periode referensi yang panjang misalnya 10 tahun ke atas, karena pembentukan modal bersifat akumulatif.

BAB. III

PERKEMBANGAN EKONOMI MENURUT WILAYAH PEMBANGUNAN DI JAWA TENGAH

Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia. Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 8 (delapan) wilayah pengembangan utama. Pengelompokan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, pengembangan kewilayahan meliputi Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang.

3.1. Arah Pengembangan Perwilayahan

Wilayah Pembangunan **Barlingmascakeb** meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Pengembangan Wilayah Pembangunan **Purwomanggung** meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo,

Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Wilayah Pembangunan **Subosukawonosraten** meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Wilayah Pembangunan **Banglor** meliputi 2 (dua) kabupaten di perbatasan sebelah timur-utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur yaitu Kabupaten Rembang dan Blora. Wilayah Pembangunan **Wanarakuti** (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati. Wilayah Pembangunan **Kedungsepur** meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan). Wilayah Pembangunan **Petanglong** meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Wilayah Pembangunan Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang

3.1.1. Wilayah Pembangunan Barlingmascakep

Arah kebijakan Wilayah Pembangunan Barlingmascakeb adalah “Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb Berbasis Agrominapolitan dan Pariwisata Terpadu yang Didukung Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Jasa Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan. Wilayah Pembangunan ini direncanakan pengembangan kegiatan perekonomian utamanya adalah : fasilitasi pengembangan kawasan industri Cilacap dan Kebumen; Upgrading RDMP; industri semen; pariwisata koridor Nusakambangan - Baturraden dan sekitarnya; serta pengembangan kawasan agropolitan Mangga Mas.

3.1.2. Wilayah Pembangunan Purwomanggung

Arah kebijakan Wilayah Pembangunan Purwomanggung adalah “Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian Dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan

Berkelanjutan”. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan pada Wilayah Pembangunan ini adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan yang didukung sektor perkebunan dan peternakan. Pengembangan Wilayah Pembangunan Purwomanggung yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sisi timur tidak akan terlepas dari Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kulon Progo. Wilayah Pembangunan ini juga menjadi sangat strategis karena adanya KSPN Borobudur.

3.1.3. Wilayah Pembangunan Subosukawonosraten

Arah pengembangan wilayah Subosukawonosraten adalah “Pembangunan Wilayah Subosukawonosraten Berbasis Pariwisata Terpadu yang Didukung oleh Pertanian dan Industri Pengolahan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan” . Sektor unggulan wilayah adalah pariwisata, industri dan pertanian. Pengembangan pariwisata menjadi arah pembangunan utama kawasan pariwisata terpadu Surakarta dan sekitarnya (Keraton Solo, Sangiran, Tawangmangu Candi Cetho – Suku, dan lain-lain). Kabupaten/kota lainnya diarahkan untuk mengembangkan pariwisata alam, dengan memperbaiki aksesibilitas, prasarana dan sarana pendukung pariwisatanya.

3.1.4. Wilayah Pembangunan Banglor

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor adalah “Pembangunan Wilayah Banglor Berbasis Perindustrian dan Agroforestri yang Didukung Pariwisata Terpadu Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Pembangunan pengembangan wilayah diupayakan untuk meningkatkan pemerataan wilayah timur Jawa Tengah, maka ke depan di wilayah ini akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, dengan membangun kawasan industri baru di Rembang dan Pengembangan Bandara

Ngloram, yang diharapkan akan memberikan daya ungkit dan memacu percepatan pembangunan di wilayah ini.

3.1.5. Wilayah Pembangunan Wanarakuti

Pengembangan wilayah Wanarakuti diarahkan pada “Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang lestari Berbasis Industri Pengolahan dan Pariwisata yang Didukung Sektor Agrominapolitan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. Sektor unggulan wilayah adalah industri pengolahan dan pariwisata didukung oleh agrominapolitan.

3.1.6. Wilayah Pembangunan Kedungsepur

Kebijakan Arah pengembangan WP Kedungsepur adalah “Pengembangan Wilayah Kedungsepur Berbasis Perdagangan Jasa, dan Industri Pengolahan yang Sinergis Dengan Kegiatan Pertanian dan Pariwisata Terpadu Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. Wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya : Perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; Pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; Perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura serta; Perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

3.1.7. Wilayah Pembangunan Petanglog

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Petanglong adalah “Pengembangan Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan Kreatif dan Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. Sektor unggulan dari wilayah ini adalah pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan.

3.1.8. Wilayah Pembangunan Bregasmalang

Konsep pengembangan wilayah Bregasmalang adalah “Pengembangan Wilayah Bregasmalang berbasis Agrominapolitan dan Industri Pengolahan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah perikanan, industri, pertanian, agroindustri, pariwisata ditunjang oleh kehutanan dan energi.

3.2. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Wilayah Pembangunan

Selama 5 tahun terakhir (2018-2022) nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diseluruh wilayah pembangunan mengalami pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 PDRB diseluruh wilayah pembangunan mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Pada tahun 2018 wilayah pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kedungsepur sebesar 6,12 persen disusul Petanglong sebesar 5,73 persen dan Subosukawonosraten sebesar 5,67 persen, sedangkan yang terendah adalah Barlingmascakeb sebesar 4,04 persen.

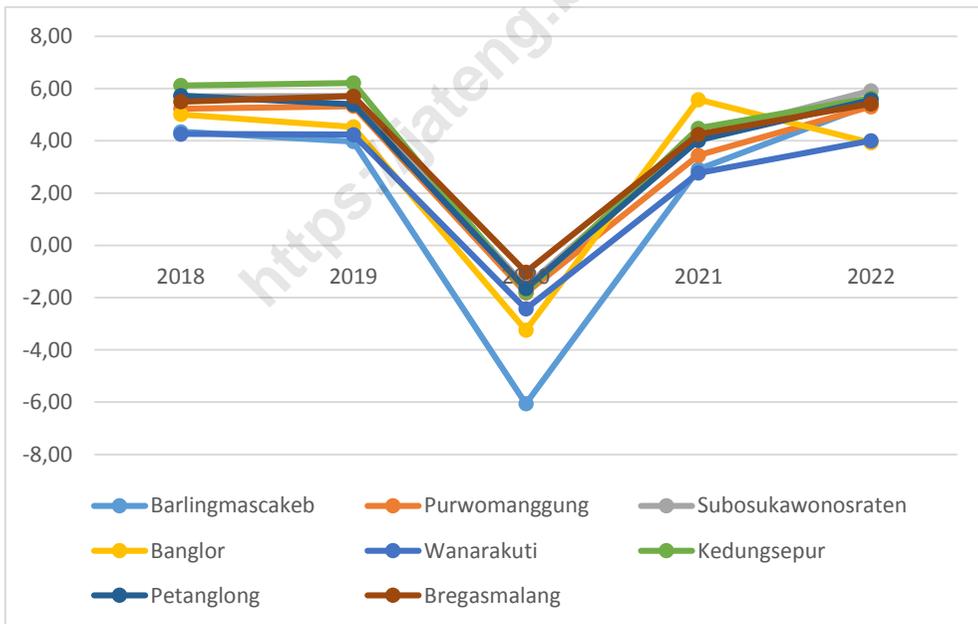
Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 dirasakan oleh seluruh wilayah pembangunan di Jawa Tengah. Kontraksi terdalam dialami oleh Barlingmascakeb sebesar minus 6,06 persen disusul Banglor sebesar 3,25 persen dan Wanarakuti sebesar 2,43 persen. Sedangkan kontraksi paling kecil dialami oleh Bregasmalang sebesar minus 1,02 persen.

Pada tahun 2021, wilayah pembangunan Banglor memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,58 persen, disusul Kedungsepur sebesar 4,48 persen dan Bregasmalang sebesar 4,25 persen. Sedangkan Wanarkuti masih menduduki peringkat terbawah sebesar 2,77 persen. Sementara itu pada tahun 2021, wilayah

pembangunan Subosukawonosraten berada posisi keempat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,19 persen.

Pada tahun 2022 hampir seluruh wilayah pembangunan menunjukkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Hanya wilayah pembangunan Banglor yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,58 persen menjadi 3,93 persen. Wilayah pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah wilayah pembangunan Subosukowanosraten sebesar 5,92 persen, disusul wilayah pembangunan Kedungsepur sebesar 5,64 persen dan Petanglong sebesar 5,57 persen.

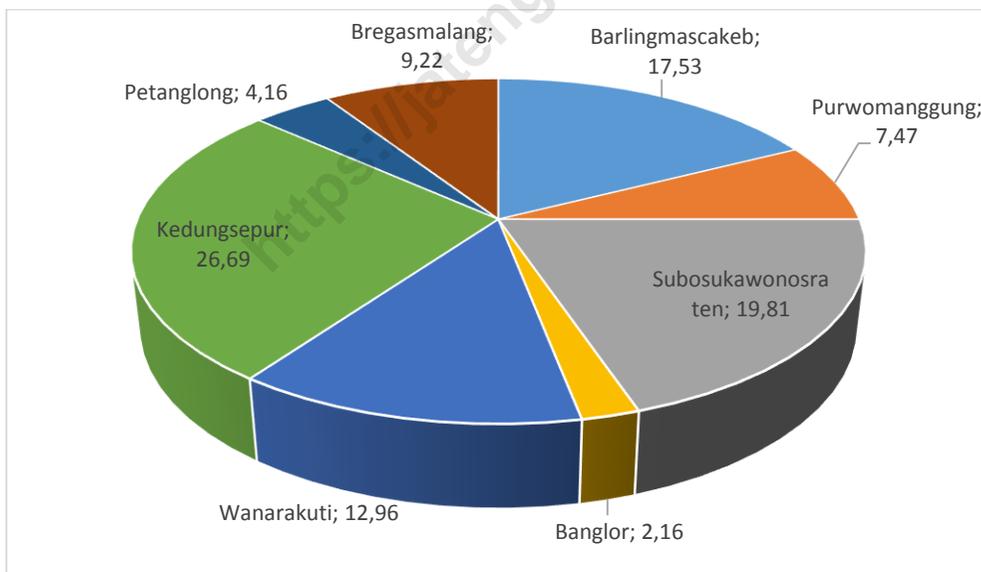
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pembangunan Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

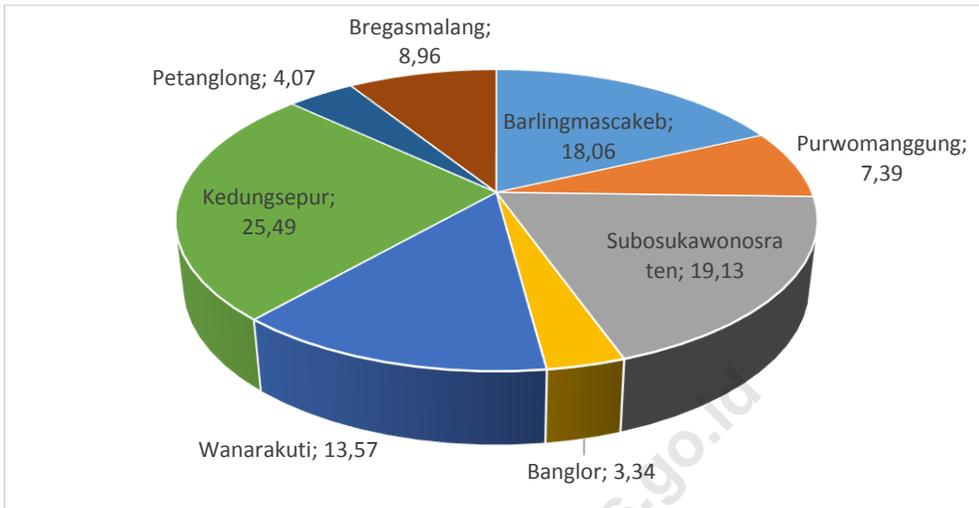
Lebih dari seperempat pembentukan PDRB Jawa Tengah pada tahun 2022 disumbang oleh Wilayah Pembangunan Kedungsepur sebesar 26,69 persen disusul Subosukawonosraten yang menyumbang 19,81 persen, Barlingmascakeb sebesar 17,53 persen dan Wanarakuti sebesar 12,96 persen. Kontribusi wilayah pembangunan lainnya masih di bawah 10 persen, yaitu Bergasmalang sebesar 9,23 persen, Purwomanggung sebesar 7,47 persen, Petanglong sebesar 4,16 persen dan Banglor sebesar 2,16 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, kontribusi Kedungsepur dan Subosukawonosraten mengalami peningkatan, dimana kontribusinya masing-masing tercatat sebesar 25,49 persen dan 19,13 persen. Sedangkan Barlingmascakeb dan Wanarakuti kontribusinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar 18,06 persen dan 13,57 persen.

Tabel 3.2. Peranan PDRB Wilayah Pembangunan 2022 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.3. Peranan PDRB Wilayah Pembangunan 2018 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

3.3. Potensi Perekonomian Wilayah Pembangunan

Sebagian besar wilayah pembangunan memiliki lapangan usaha dengan kontribusi yang dominan adalah Industri Pengolahan, Pertanian dan Perdagangan. Wilayah pembangunan yang memiliki pola yang berbeda adalah Banglor, dimana pertambangan dan penggalan memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pertanian, sedangkan pada Kedungsepur kontribusi terbesar kedua adalah Konstruksi setelah Industri Pengolahan.

Wilayah pembangunan dengan kontribusi terbesar adalah Industri pengolahan antara lain : Barlingmascakeb. Subosukawonosraten, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang. Bahkan pada wilayah Wanarakuti kontribusi sektor Industri Pengolahan lebih dari separuh yaitu 57,98 persen. Hal ini dipengaruhi oleh Kabupaten Kudus yang memiliki kontribusi terhadap industri rokok terbesar di Jawa Tengah. Sedangkan wilayah pembangunan dengan kontribusi terbesar adalah pertanian antara lain : Purwomanggung dan Banglor.

Tabel 3.1. Lapangan Usaha dengan Kontribusi Terbesar menurut Wilayah Pembangunan, 2022

Wilayah Pembangunan	Lapangan Usaha	Kontribusi (%)
Barlingmascakeb	Industri Pengolahan	38,63
	Pertanian	14,85
	Perdagangan	11,07
Purwomanggung	Pertanian	24,85
	Industri Pengolahan	21,49
	Perdagangan	16,80
Subosukawanosraten	Industri Pengolahan	30,67
	Perdagangan	16,27
	Pertanian	12,51
Banglor	Pertanian	22,09
	Pertambangan dan Penggalian	17,67
	Industri Pengolahan	15,48
Wanarakuti	Industri Pengolahan	57,98
	Perdagangan	9,78
	Pertanian	9,69
Kedungsepur	Industri Pengolahan	29,70
	Konstruksi	18,61
	Perdagangan	13,67
Petanglong	Industri Pengolahan	30,15
	Pertanian	15,37
	Perdagangan	14,68
Bregasmalang	Industri Pengolahan	23,64
	Pertanian	23,44
	Perdagangan	16,63

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4.1. Perkembangan Nilai PMTB

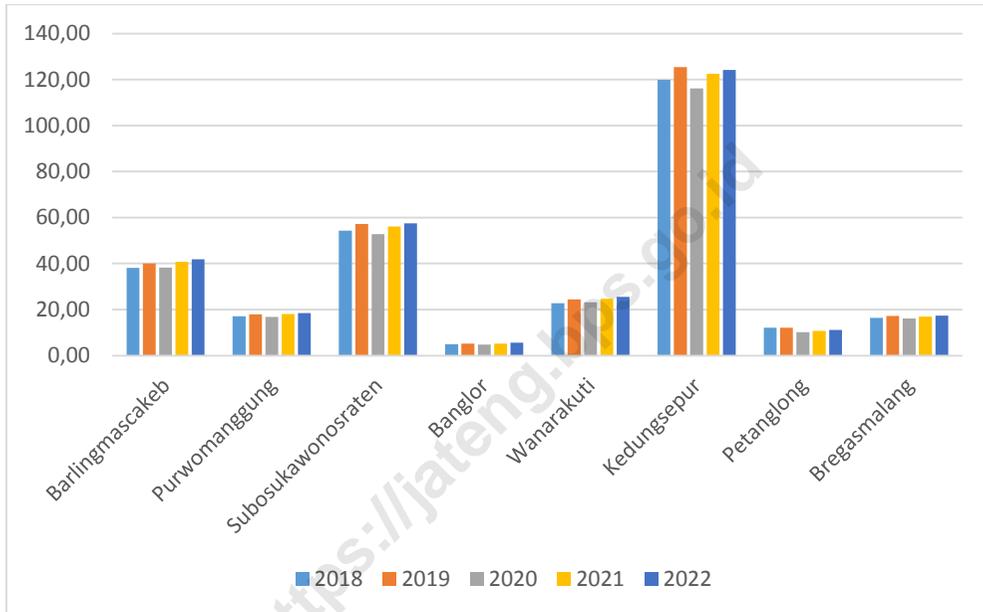
Besarnya investasi dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya. Produktivitas marginal adalah tambahan output yang diperoleh pada setiap tambahan satu unit modal dalam proses produksi dengan asumsi faktor produksi yang lain konstan (*ceteris paribus*). Investasi akan dilakukan apabila produktivitas investasi masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga yang akan diterimanya seandainya modal itu dipinjamkan dan tidak diinvestasikan.

Investasi dalam kegiatan ekonomi mempunyai arti luas. Investasi selalu dikaitkan kegiatan menanam uang atau modal dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan kapasitas produksi pada masa yang akan datang. Dalam penyusunan ICOR Jawa Tengah menggunakan asumsi bahwa nilai investasi sama dengan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Konstan yang merupakan bentuk investasi fisik yang secara rill.

Perkembangan nilai PMTB hamper di seluruh wilayah pembangunan selama lima tahun terakhir (2017-2021) terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2022, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan. Wilayah pembangunan yang memiliki nilai PMTB tertinggi selama lima tahun terakhir dimiliki oleh Kedungsepur sebesar Rp 119,88 triliun pada tahun 2018 dan terus meningkat hingga tahun 2022 mencapai Rp 124,18 triliun, namun pada tahun 2020 menurun menjadi Rp 116,16 triliun. Pada tahun 2022 lebih dari sepertiga nilai investasi di Jawa Tengah berada di Wilayah Kedungsepur yaitu sebesar 41,16 persen. Sementara itu share terendah dari nilai investasi berada di wilayah Banglor yang nilainya masih di

bawah 2 persen, pada tahun 2022 sebesar 1,85 persen. Nilai investasi wilayah Banglor pada tahun 2022 hanya Rp 5,59 triliun.

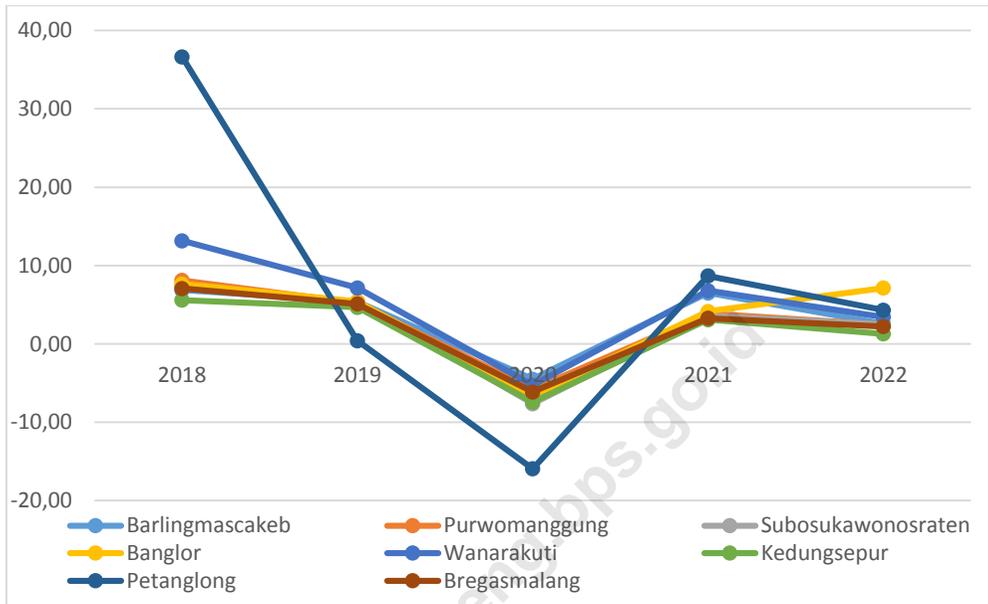
Gambar 4.1. Perkembangan Nilai PMTB ADHK Wilayah Pembangunan, Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Apabila di lihat dari pertumbuhannya, nilai PMTB di semua wilayah pembangunan mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2018 pertumbuhan nilai investasi tertinggi dimiliki oleh wilayah Petanglong sebesar 36,64 persen disusul Wanarakuti sebesar 13,16 dan Purwomanggung sebesar 8,10 persen. Pertumbuhan nilai PMTB terendah pada tahun 2018 terjadi pada Kedungsepur memiliki pertumbuhan sebesar 5,59 persen. Sementara itu pada tahun 2022 pertumbuhan nilai investasi tertinggi masih dimiliki oleh wilayah Banglor sebesar 7,13 persen disusul Petanglong sebesar 4,32 persen dan Wanarakuti sebesar 3,45 persen. Pertumbuhan terendah masih dimiliki oleh Kedungsepur sebesar 1,28 persen.

**Gambar 4.2. Pertumbuhan PMTB Wlayah Pembangunan , 2018-2022
(Persen)**



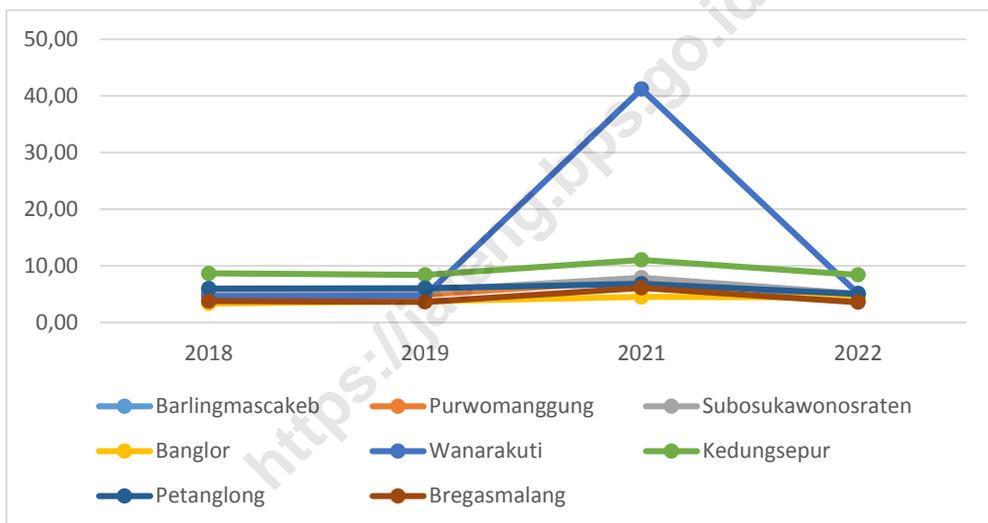
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

4.2. Analisis ICOR Wilayah Pembangunan

Penghitungan ICOR tahun 2020 tidak dilakukan analisis. Hal ini disebabkan tahun 2020 merupakan kondisi khusus, dimana perekonomian seluruh dunia mengalami guncangan karena pandemi Covid-19. Guncangan ini sudah tentu akan berdampak pada nilai ICOR, yang nilainya sangat anomali (aneh). Wilayah pembangunan yang memiliki nilai koefisien ICOR paling tinggi selama periode 2018-2022 adalah wilayah Kedungsepur dengan nilai koefisien ICOR di atas 8. Hal ini memberikan gambaran bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Kedungsepur relatif paling tidak efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di Kedungsepur cenderung bersifat capital intensive.

Seluruh wilayah pembangunan di Jawa Tengah tidak ada yang memiliki nilai koefisien ICOR ideal (efisien) yaitu berada pada kisaran 3-4 pada periode 2018-2022. Seluruh wilayah pembangunan pada periode tersebut memiliki nilai koefisien ICOR di atas 4, sehingga bisa dikatakan kegiatan investasi yang dilakukan di seluruh wilayah pembangunan relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut cenderung bersifat capital intensive.

Gambar 4.3. Perkembangan ICOR menurut Wilayah Pembangunan, Tahun 2018-2022



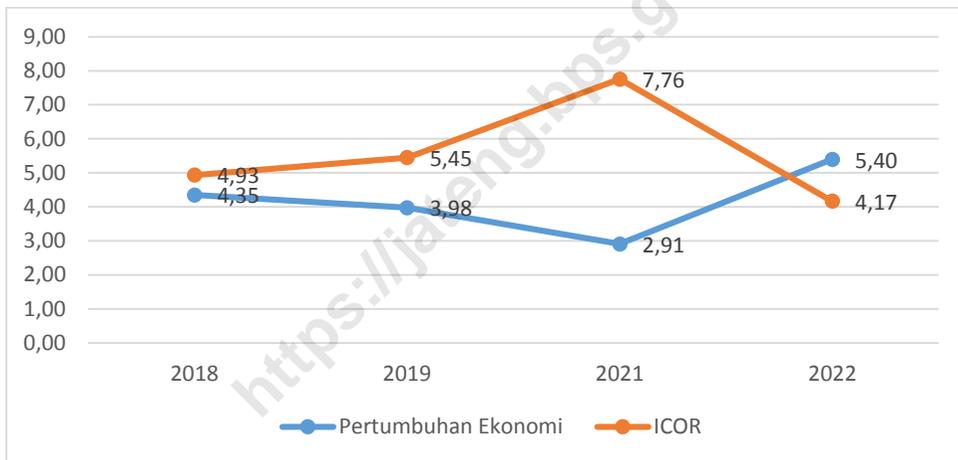
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Meskipun pada tahun 2022 perekonomian Jawa Tengah sudah mulai pulih, namun terlihat kegiatan investasi di hampir semua wilayah pembangunan relatif masih kurang efisien. Hal ini terlihat dari meningkatnya secara signifikan nilai koefisien ICOR di hampir semua wilayah pembangunan pada tahun 2021 hingga di atas angka 4, kecuali di Wilayah Pembangunan Bregasmalang nilai koefisien ICORnya tercatat sebesar 3,60. Hal ini menunjukkan pada tahun 2022 nilai koefisien ICOR yang ideal hanya di Wilayah Pembangunan Bregasmalang.

4.2.1. ICOR Wilayah Barlingmascakeb

Gambar 4.4 menyajikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan ICOR Wilayah Barlingmascakeb selama periode 2018-2022. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penghitungan ICOR tahun 2020 tidak dilakukan analisis. Hal ini disebabkan tahun 2020 merupakan kondisi khusus, dimana perekonomian seluruh dunia mengalami guncangan karena pandemi Covid-19. Guncangan ini sudah tentu akan berdampak pada nilai ICOR, yang nilainya sangat anomali (aneh).

Gambar 4.4. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Barlingmascakeb, 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Pada tahun 2018 nilai koefisien ICOR Wilayah Barlingmascakeb tercatat sebesar 4,93, kemudian meningkat menjadi 5,45 pada tahun 2019 dan kembali meningkat signifikan sebesar 7,76 pada tahun 2021, menurun menjadi 4,17 pada 2022. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Barlingmascakeb relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di Barlingmascakeb cenderung bersifat capital intensive. Padahal secara umum, angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4. Perkembangan nilai ICOR Wilayah Barlingmascakeb mengikuti perkembangan laju pertumbuhan ekonomi

Wilayah Barlingmascakeb, dimana saat terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menyebabkan meningkatnya nilai Icor di Wilayah Barlingmascakeb.

Tabel 4.1. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Barlingmascakeb, 2018-2022

Lag	Tahun				Rata-rata 2018- 2022
	2018	2019	2021	2022	
Lag 0	4,93	5,45	7,76	4,17	5,58
Lag 1	5,17	-3,44	4,06	-0,21	1,39
Lag 2	-3,26	7,62	-0,21		1,38

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

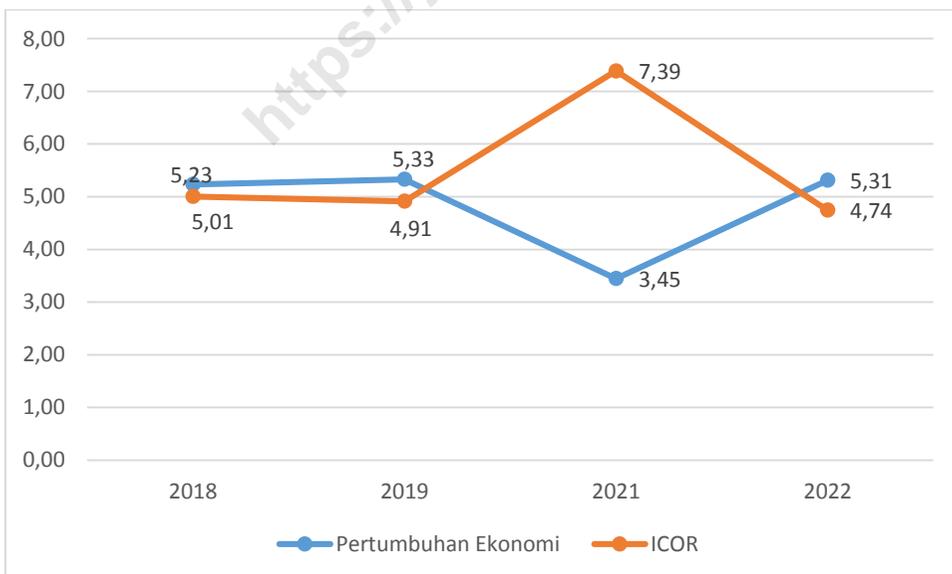
Koefisien ICOR dalam publikasi ini dihitung berdasarkan nilai investasi dan output yang dinilai dalam harga konstan agar pengaruh fluktuasi harga dalam ukuran ICOR dapat dihilangkan (atas dasar harga konstan 2010). Koefisien ICOR di tahun 2022 pada lag 0 sebesar 4,17 memberikan informasi bahwa untuk meningkatkan 1 unit output dibutuhkan penambahan modal atau investasi sebanyak 4,17 unit, penanaman investasi dan peningkatan output ini terjadi pada kurun waktu (tahun) yang sama. Angka tersebut dapat juga diartikan untuk meningkatkan PDRB (ADHK) sebesar Rp 1 M dibutuhkan investasi sebesar Rp 4,17 M. PDRB yang dinilai dalam harga konstan agar pengaruh fluktuasi harga dalam ukuran ICOR dapat dihilangkan (atas dasar harga konstan 2010).

Time lag (lag) merupakan rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi dapat menghasilkan tambahan output. Berdasarkan metode standar yang digunakan untuk menghitung ICOR Wilayah Barlingmascakeb 2018-2022, rata-rata koefisien ICOR untuk lag 0 sebesar 5,58; lag 1 sebesar 1,39; dan lag 2 sebesar 1,38. Nilai koefisien ICOR baik pada ICOR tanpa lag (Lag 0), maupun ICOR lag 1 tahun (Lag 1) maupun ICOR dengan lag 2 tahun (Lag 2) menunjukkan fluktuasi, mengikuti pertumbuhan ekonomi.

4.2.2. ICOR Wilayah Purwomanggung

Perkembangan nilai ICOR Wilayah Purwomanggung mengikuti perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Purwomanggung, dimana saat terjadinya meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 menyebabkan menurunnya nilai ICOR di Wilayah Purwomanggung. Pada tahun 2018 nilai koefisien ICOR Wilayah Purwomanggung tercatat sebesar 5,01, kemudian menurun menjadi 4,91 pada tahun 2019 seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan kembali meningkat signifikan sebesar 7,39 pada tahun 2021 akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Purwomanggung relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di Purwomanggung cenderung bersifat capital intensive. Padahal secara umum, angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4.

Gambar 4.5. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Purwomanggung, 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan metode standar yang digunakan untuk menghitung ICOR Wilayah Purwomanggung 2018-2022, rata-rata koefisien ICOR untuk lag 0 sebesar 5,51; lag 1 sebesar +1,15; dan lag 2 sebesar -1,96. Nilai koefisien ICOR baik pada ICOR tanpa lag (Lag 0), maupun ICOR lag 1 tahun (Lag 1) maupun ICOR dengan lag 2 tahun (Lag 2) menunjukkan fluktuasi, mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.2. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Purwomanggung, 2018-2022

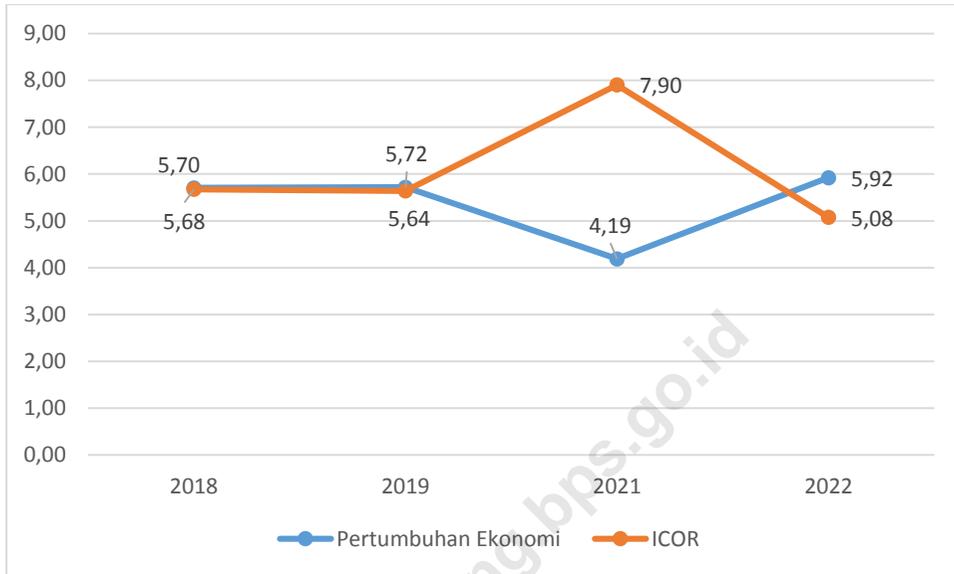
Lag	Tahun				Rata-rata 2018- 2022
	2018	2019	2021	2022	
Lag 0	5,01	4,91	7,39	4,74	5,51
Lag 1	4,67	-13,67	4,63	-0,24	-1,15
Lag 2	-12,99	7,35	-0,23		-1,96

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4.2.3. ICOR Wilayah Subosukawonosraten

Pada tahun 2018 nilai koefisien ICOR Wilayah Subosukawonosraten sebesar 5,61 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen, meskipun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,23 persen namun nilai koefisien ICOR tetap atau stabil. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,33 persen telah menyebabkan penurunan nilai koefisien ICOR menjadi 4,91. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menjadi 3,45 persen menyebabkan meningkatkan nilai koefisien ICOR secara signifikan menjadi 7,39. Kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Subosukawonosraten relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di Wilayah Subosukawonosraten cenderung bersifat capital intensive karena angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4.

Gambar 4.6. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Subosukawonosraten, 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Dari penghitungan ICOR Wilayah Subosukawonosraten 2018-2022 berdasarkan metode standar diperoleh rata-rata koefisien ICOR untuk lag 0 sebesar 6,07; lag 1 sebesar -2,33; dan lag 2 sebesar -3,53. Nilai koefisien ICOR baik pada ICOR tanpa lag (Lag 0), maupun ICOR lag 1 tahun (Lag 1) maupun ICOR dengan lag 2 tahun (Lag 2) menunjukkan fluktuasi, mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.3. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Subosukawonosraten, 2018-2022

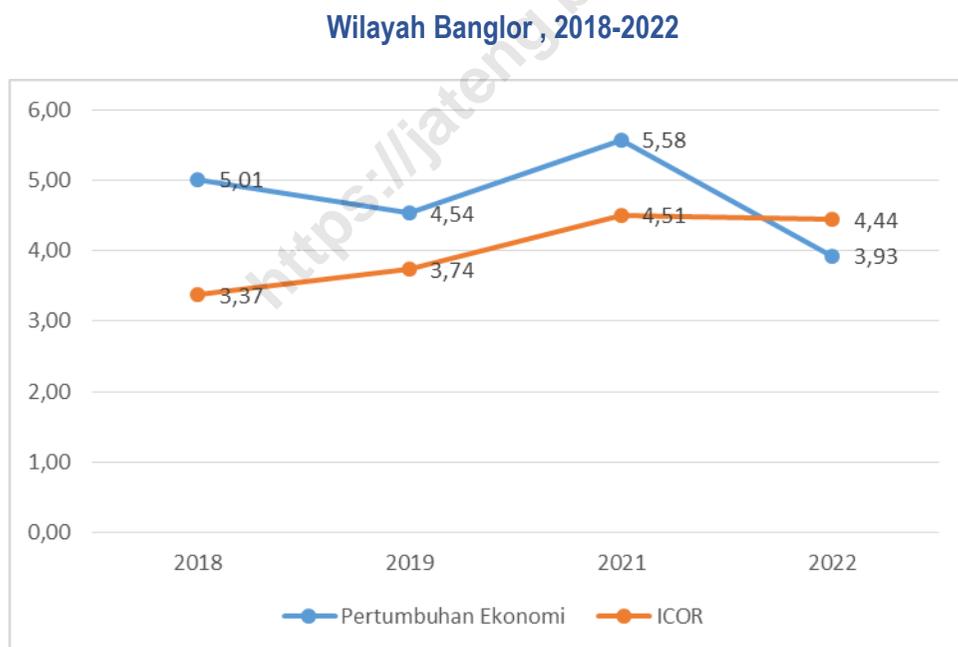
Lag	Tahun				Rata-rata 2018-2022
	2018	2019	2021	2022	
Lag 0	5,68	5,64	7,90	5,08	6,07
Lag 1	5,36	-19,33	4,95	-0,28	-2,33
Lag 2	-18,35	8,04	-0,28		-3,53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4.2.4. ICOR Wilayah Banglor

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Banglor pada periode 2018-2022 menunjukkan perlambatan dari 5,01 persen pada tahun 2018 menjadi 3,93 persen pada tahun 2022. Nilai Koefisien ICOR pada wilayah Banglor menunjukkan kenaikan, dari 3,37 pada tahun 2018 menjadi 4,44 pada tahun 2022. Secara umum, nilai koefisien ICOR di wilayah Banglor dapat dianggap semakin kurang ideal (efisien) karena berada di atas kisaran 3-4. Perkembangan nilai ICOR Wilayah Banglor mengikuti perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Banglor, dimana saat terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 menyebabkan meningkatnya nilai ICOR di Wilayah Banglor secara signifikan menjadi 4,44.

Gambar 4.7. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan metode standar yang digunakan untuk menghitung ICOR Wilayah Banglor 2018-2022, rata-rata koefisien ICOR untuk lag 0 sebesar 4,01; lag 1 sebesar 0,63; dan lag 2 sebesar -0,14. Nilai koefisien ICOR baik pada ICOR tanpa lag (Lag 0), maupun ICOR lag 1 tahun (Lag 1) maupun ICOR dengan lag 2 tahun (Lag 2) menunjukkan fluktuasi, mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.4. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Banglor, 2018-2022

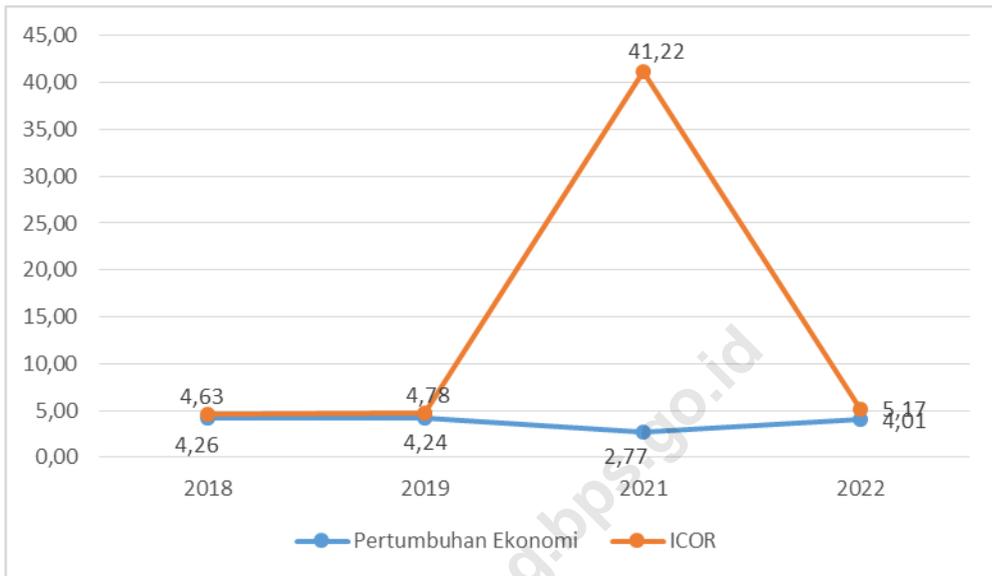
Lag	Tahun				Rata-rata 2018-2022
	2018	2019	2021	2022	
Lag 0	3,37	3,74	4,51	4,44	4,01
Lag 1	3,55	-5,00	4,15	-0,17	0,63
Lag 2	-4,74	4,47	-0,16		-0,14

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4.2.5. ICOR Wilayah Wanarakuti

Perkembangan nilai ICOR Wilayah Wanarakuti mengikuti perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Wanarakuti, dimana saat terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi akibat belum pulihnya perekonomian ekonomi pada tahun 2022 menyebabkan meningkatnya nilai Icor di Wilayah Wanarakuti. Pada tahun 2018 nilai koefisien ICOR Wilayah Wanarakuti tercatat sebesar 4,26, kemudian sedikit menurun menjadi 4,24 pada tahun 2019 seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan kembali meningkat signifikan sebesar 41,22 pada tahun 2021 akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 4,01 persen mampu menurunkan ICOR menjadi 5,17. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Wanarakuti relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di Wanarakuti cenderung bersifat capital intensive. Padahal secara umum, angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4.

**Gambar 4.8. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Wilayah Wanarakuti , 2018-2022**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Dari penghitungan ICOR Wilayah Wanarakuti 2018-2022 berdasarkan metode standar diperoleh rata-rata koefisien ICOR untuk lag 0 sebesar 13,95; lag 1 sebesar 0,31; dan lag 2 sebesar 11,05. Nilai koefisien ICOR baik pada ICOR tanpa lag (Lag 0), maupun ICOR lag 1 tahun (Lag 1) maupun ICOR dengan lag 2 tahun (Lag 2) menunjukkan fluktuasi, mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.5. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Wanarakuti, 2018-2022

Lag	Tahun				Rata-rata 2018-2022
	2018	2019	2021	2022	
Lag 0	4,63	4,78	41,22	5,17	13,95
Lag 1	4,46	-8,01	4,99	-0,20	0,31
Lag 2	-7,47	40,83	-0,19		11,05

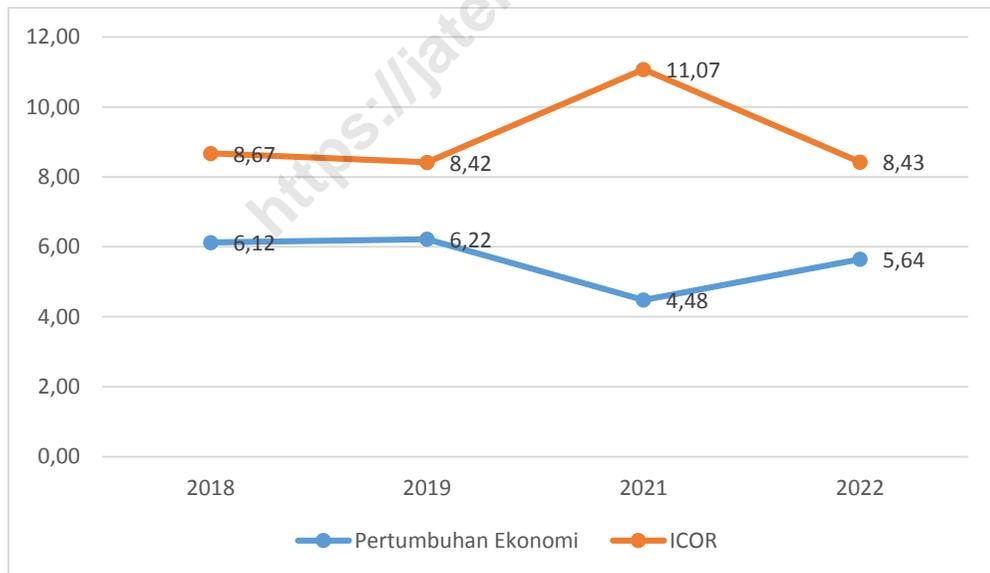
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4.2.6. ICOR Wilayah Kedungsepur

Perkembangan nilai ICOR Wilayah Kedungsepur mengikuti perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Kedungsepur, dimana saat terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menyebabkan meningkatnya nilai ICOR di Wilayah Kedungsepur. Sebaliknya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi yang meningkat diikuti dengan menurunnya nilai ICOR. Selama kurun waktu 2018-2022 nilai ICOR selalu di atas nilai 8. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Kedungsepur relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di Kedungsepur cenderung bersifat capital intensive. Padahal secara umum, angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4.

Gambar 4.9. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Wilayah Kedungsepur , 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Dari penghitungan ICOR Wilayah Kedungsepur 2018-2022 berdasarkan metode standar diperoleh rata-rata koefisien ICOR untuk lag 0 sebesar 9,15; lag 1 sebesar -2,96; dan lag 2 sebesar -5,21. Nilai koefisien ICOR baik pada ICOR tanpa

lag (Lag 0), maupun ICOR lag 1 tahun (Lag 1) maupun ICOR dengan lag 2 tahun (Lag 2) menunjukkan fluktuasi, mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.6. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Kedungsepur, 2018-2022

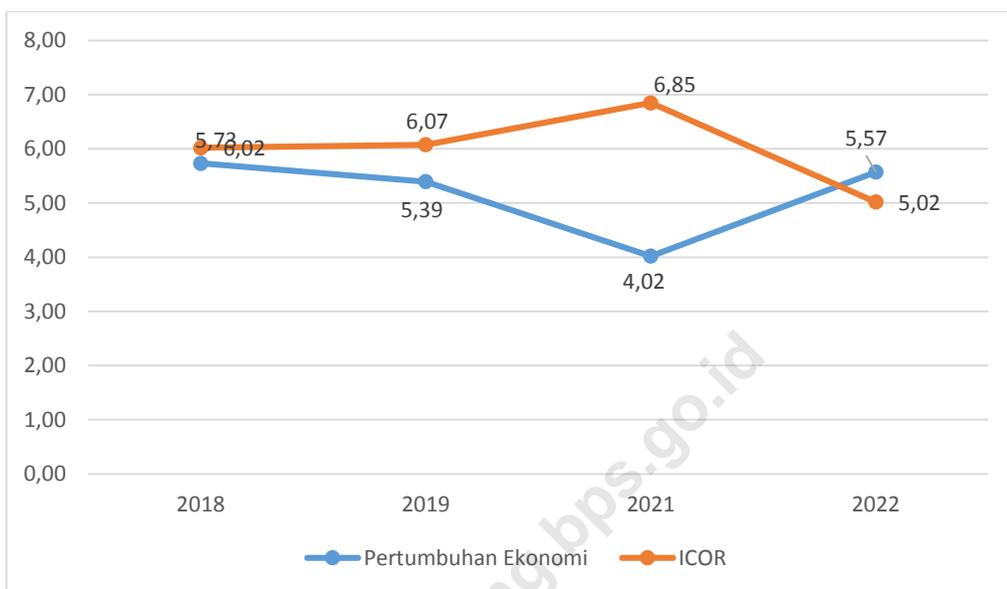
Lag	Tahun				Rata-rata
	2018	2019	2021	2022	2018-2022
Lag 0	8,67	8,42	11,07	8,43	9,15
Lag 1	8,04	-27,74	8,32	-0,45	-2,96
Lag 2	-26,51	11,33	-0,44		-5,21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4.2.7. ICOR Wilayah Petanglong

Perkembangan nilai ICOR Wilayah Petanglong mengikuti perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Petanglong. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah Petanglong selama periode 2018-2022 terus meningkat. Pola yang sama terlihat pada perkembangan nilai koefisien ICOR. Pada tahun 2018 nilai koefisien ICOR Wilayah Petanglong tercatat sebesar 6,02, kemudian kembali meningkat menjadi 6,07 pada tahun 2019. Nilai koefisien ICOR meningkat signifikan sebesar 6,85 pada tahun 2021 akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, namun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 menyebabkan penurunan nilai ICOR. Selama periode 2018-2022 nilai ICOR wilayah Petanglong selalu di atas nilai 5. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Petanglong relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di Petanglong cenderung bersifat capital intensive.

Gambar 4.10. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Petanglong , 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan metode standar yang digunakan untuk menghitung ICOR Wilayah Petanglong 2018-2022, rata-rata koefisien ICOR untuk lag 0 sebesar 5,99; lag 1 sebesar -2,06; dan lag 2 sebesar -3,75. Nilai koefisien ICOR baik pada ICOR tanpa lag (Lag 0), maupun ICOR lag 1 tahun (Lag 1) maupun ICOR dengan lag 2 tahun (Lag 2) menunjukkan fluktuasi, mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.7. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Petanglong, 2018-2022

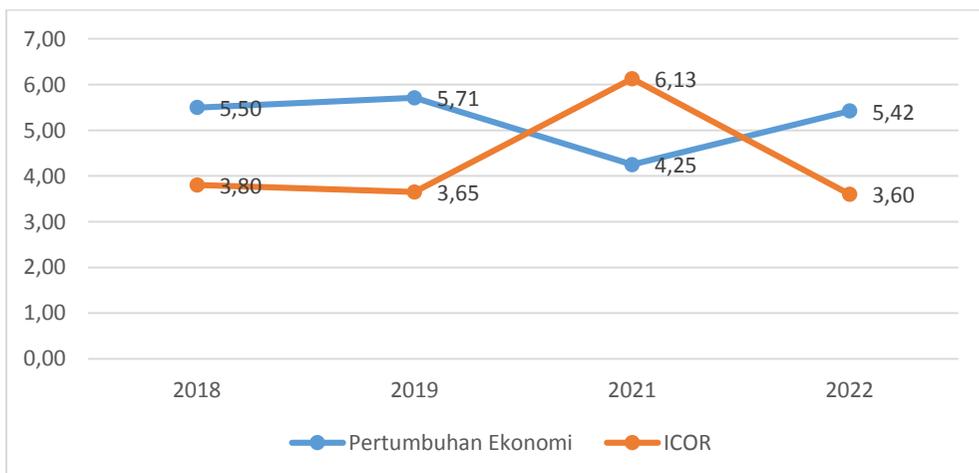
Lag	Tahun				Rata-rata 2018- 2022
	2018	2019	2021	2022	
Lag 0	6,02	6,07	6,85	5,02	5,99
Lag 1	6,05	-18,85	4,81	-0,26	-2,06
Lag 2	-18,77	7,76	-0,25		-3,75

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4.2.8. ICOR Wilayah Bregasmalang

Perkembangan nilai ICOR Wilayah Bregasmalang mengikuti perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Bregasmalang. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah Bregasmalang pada tahun 2018 mengalami perlambatan sebesar 5,50 persen, sementara itu nilai koefisien ICOR Wilayah Bregasmalang pada tahun 2018 meningkat sebesar 3,80. Sementara itu pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,71 persen, sedangkan nilai koefisien ICOR menurun menjadi 3,65. Nilai koefisien ICOR meningkat signifikan sebesar 6,13 pada tahun 2021 akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42 persen pada tahun 2022 diiringi dengan penurunan nilai ICOR menjadi 3,60. Dari nilai koefisien ICOR selama periode 2018-2022 menunjukkan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Bregasmalang cenderung sudah efisien, karena nilai koefisien ICOR nya berada pada rentang nilai ideal yaitu 3 - 4.

Gambar 4.11. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Bregasmalang , 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Dari penghitungan ICOR Wilayah Bregasmalang 2018-2022 berdasarkan metode standar diperoleh rata-rata koefisien ICOR untuk lag 0 sebesar 4,29; lag 1 sebesar -3,11; dan lag 2 sebesar -4,11. Nilai koefisien ICORT baik pada ICOR tanpa lag (Lag 0), maupun ICOR lag 1 tahun (Lag 1) maupun ICOR dengan lag 2 tahun (Lag 2) menunjukkan fluktuasi, mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.8. Nilai Rata-rata ICOR Wilayah Bregasmalang, 2018-2022

Lag	Tahun				Rata-rata
	2018	2019	2021	2022	2018-2022
Lag 0	3,80	3,65	6,13	3,60	4,29
Lag 1	3,47	-19,26	3,52	-0,19	-3,11
Lag 2	-18,32	6,19	-0,18		-4,11

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Asumsi dari teori Harrod-Domar secara implisit adalah bahwa pengeluaran investasi tahunan akan terakumulasi dalam bentuk capital, atau barang modal. Secara konsep karakter dari barang modal pada dasarnya tidak serta merta atau secara otomatis menghasilkan output mana kala barang modal tersebut tidak dioperasionalkan. Sementara, barang modal selalu membutuhkan perawatan dan biaya operasional minimum meskipun tidak dioperasionalkan. Oleh karena itu, secara konsep ICOR bisa bernilai negatif bila mengalami *under utilized*. *Under utilized of capital* sangat mungkin terjadi pada beberapa sector, terutama sector yang bersifat *heavy capital*.

Dari hasil analisis yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, maka kajian ini dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 8 (delapan) wilayah pengembangan utama. Pengelompokan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan.
2. Selama 5 tahun terakhir (2018-2022) nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diseluruh wilayah pembangunan mengalami pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 PDRB diseluruh wilayah pembangunan mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif.
3. Lebih dari seperempat pembentukan PDRB Jawa Tengah pada tahun 2022 disumbang oleh Wilayah Pembangunan Kedungsepur sebesar 26,69 persen disusul Subosukawonosraten yang menyumbang 19,81 persen, Barlingmascakeb sebesar 17,53 persen dan Wanarakuti sebesar 12,96 persen. Kontribusi wilayah pembangunan lainnya masih di bawah 10 persen.
4. Perkembangan nilai investasi di seluruh wilayah pembangunan selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2022, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan. Wilayah pembangunan yang memiliki nilai investasi tertinggi selama lima tahun terakhir dimiliki oleh

Kedungsepur. Sementara itu share terendah dari nilai investasi berada di wilayah Banglor yang nilainya masih di bawah 2 persen.

5. Apabila di lihat dari pertumbuhannya, investasi di semua wilayah pembangunan mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2018 pertumbuhan nilai investasi tertinggi dimiliki oleh wilayah Petanglong sebesar 36,64 persen disusul Wanarakuti sebesar 13,16 dan Purwomanggung sebesar 8,10 persen. Pertumbuhan nilai PMTB terendah pada tahun 2018 terjadi pada Kedungsepur memiliki pertumbuhan sebesar 5,59 persen. Sementara itu pada tahun 2022 pertumbuhan nilai investasi tertinggi masih dimiliki oleh wilayah Banglor sebesar 7,13 persen disusul Petanglong sebesar 4,32 persen dan Wanarakuti sebesar 3,45 persen. Pertumbuhan terendah masih dimiliki oleh Kedungsepur sebesar 1,28 persen.
6. Wilayah pembangunan yang memiliki nilai koefisien ICOR paling tinggi selama periode 2018-2022 adalah wilayah Kedungsepur dengan nilai koefisien ICOR di atas 8. Hal ini memberikan gambaran bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Kedungsepur relatif paling tidak efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di Kedungsepur cenderung bersifat capital intensive. Wilayah yang memiliki nilai koefisien ICOR ideal (efisien) yaitu berada pada kisaran 3-4 pada periode 2018-2022 adalah Wilayah Banglor dan Bregasmalang. Wilayah pembangunan lainnya pada periode tersebut memiliki nilai koefisien ICOR di atas 4, sehingga bisa dikatakan kegiatan investasi yang dilakukan di Wilayah Pembangunan lainnya relatif kurang efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut cenderung bersifat capital intensive.

- BPS. 2004. Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri Pengolahan Tahun 1990-2002. Jakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2017. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2016. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2021. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016-2020. Yogyakarta
- BPS Jawa Tengah. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut lapangan Usaha 2018-2022. Semarang.
- BPS Jawa Tengah. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran 2018-2022. Semarang.
- Mankiw, N.G. 2007. Macroeconomics. Sixth Edition. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan. Kebijakan, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.2019. Perda Provinsi Jawa Tengah No : 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Semarang.
- Todaro, M.P. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Widodo, Hg.S.T. 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Kanisius. Yogyakarta.

DATA

<https://jateng.bps.go.id>

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

JL. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412804, 8412805, Fax 8311195

Homepage : <https://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id